

STRUKTUR PENGUASAAN LAHAN DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA TANI

(Studi Kasus di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah)

DEWA K.S. SWASTIKA¹⁾, ADIMESRA DJULIN¹⁾ dan RACHMAT RAMLI²⁾

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Litbang Pertanian, Bogor
dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Kalimantan Tengah

ABSTRACT

Agricultural sector in Central Kalimantan is expected to be a leading sector, especially to provide food and export. Therefore, improvement of technology is badly needed. The establishment of Assessment Institute for Agricultural Technology (AIAT) is aimed to do packaging and dissemination of mature and appropriate technology to meet the local stakeholders and beneficiaries needs. The appropriate technology should be based on the characteristics of local bio-physical and socio-economic environment. This article is aimed to present the baseline condition of land holding and income distribution of farmers in tidal swampy area of Kapuas and dry land in South Barito districts of Central Kalimantan. The results of the study showed that the average land holding in South Barito is larger than that of in Kapuas. Land holding is equally distributed among farmers, shown by Gini Index of 0.28 and 0.27, respectively, for ownership and operated. In Kapuas, land holding is relatively unequal, shown by gini index of 0.42 and 0.49, respectively, for ownership and operated. The annual household income in Kapuas was Rp 6.5 million or Rp 1,3 million/capita/year, with relatively unequal distribution among households, shown by Gini Index of 0.44. In South Barito, it was Rp 6.9 million or Rp 2,1 million/capita/year and has relatively equal distribution, reflected by Gini Index of 0.36. Most of household income is spent for food expenditure accounting for 67-69 percent in both districts. This performance indicating that the farmers still unable to improve their life quality, especially to meet their secondary needs. This implicitly shows that farmer's capability to form capital accumulation for their farming is still very low. Therefore, the least cost new technology is required.

Key Word: Agricultural Sector, Leading Sector, Agricultural Technology, Land Holding, Income Distribution of Farmers, Appropriate Technology

PENDAHULUAN

Sektor pertanian di Kalimantan Tengah masih diharapkan menjadi sektor andalan dalam menyediakan kebutuhan pangan dan ekspor non-migas. Potensi sumberdaya lahan, perairan umum dan pantai yang cukup luas, sangat memungkinkan pengembangan produksi berbagai komoditas pertanian.

Namun demikian, berbagai kendala masih merupakan hambatan bagi upaya pemanfaatan sumberdaya tersebut secara optimal. Lahan pertanian yang ada, baik lahan kering maupun lahan pasang surut, masih tergolong marginal dengan produktivitas yang rendah. Penguasaan teknologi pertanian masih sangat terbatas dan sederhana. Selain itu, kualitas tenaga kerja di sektor pertanian serta kemampuan

¹⁾ Masing-masing Ahli Peneliti Muda dan Peneliti Madya pada Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

²⁾ Ajun Peneliti Madya pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah.

modal petani yang masih rendah, merupakan hambatan bagi penerapan teknologi baru.

BPTP Kalimantan Tengah adalah unit kerja Badan Litbang Pertanian yang mempunyai mandat untuk merakit, mengkaji dan mendiseminasikan (selanjutnya disebut litkaji) berbagai alternatif teknologi pertanian di Kalimantan Tengah (Pasandaran dan Adnyana, 1995; Suryana, 1996). Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan Litkaji yang dilakukan membawa dampak positif bagi peningkatan produktivitas sumberdaya dan kesejahteraan petani, maka perlu dilakukan studi tentang kondisi awal (sebagai “bench mark”), yang akan dijadikan titik tolak evaluasi bagi keberhasilan pelaksanaan litkaji di kemudian hari.

Tulisan ini menyajikan kondisi awal tentang struktur penguasaan lahan dan pendapatan rumah tangga tani di Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kedua peubah ini dipilih, karena merupakan indikator utama yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan petani.

METODOLOGI

Lokasi

Studi ini dilakukan pada bulan Agustus 2000 di dua farming system zone (FSZ), yaitu di lahan pasang surut dengan tipe lahan sulfat masam potensial di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, dan pada lahan kering beriklim basah di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Pemilihan dua Kabupaten ini didasarkan pada pertimbangan bahwa: (i) agro-ekosistem yang paling dominan di Kalteng adalah lahan kering dan lahan pasang surut (BPS-Kalteng, 1999); (ii) FSZ di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas adalah lahan pasang surut dengan tipe lahan sulfat masam, yang merupakan tipe lahan pasang surut terluas di Kalimantan Tengah; (iii) BPTP Kalimantan Tengah telah melakukan pendekatan dan intervensi untuk memberdayakan lahan pasang surut yang selama 5 tahun telah ditinggalkan (tidak diusahakan) karena buruknya sistem tata air. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, Pemda Kalteng telah menindaklanjuti dengan program rehabilitasi saluran tata air di Kecamatan Basarang, dan BPTP Kalimantan Tengah berperan sebagai pemandu teknologi tata air. Dengan demikian, daerah ini menjadi kasus yang menarik untuk dikaji. Sebab, semua pihak nantinya bisa melihat ada atau tidaknya dampak positif dari sentuhan teknologi, mulai dari teknologi tata air sampai

teknologi budidaya tanaman di daerah ini. Sedangkan pemilihan kabupaten Barito Selatan didasarkan pada pertimbangan bahwa kabupaten ini mempunyai lahan kering yang sangat luas dan potensial untuk dikembangkan menjadi lahan usahatani yang produktif. Di daerah ini juga terdapat perkebunan karet rakyat dengan pola PIR.

Penarikan Contoh dan Analisis Data

Pemilihan dua kabupaten (Kapuas dan Barito Selatan) dan kecamatan di masing-masing kabupaten dilakukan secara purposive sampling yang didasarkan pada pertimbangan FSZ dominan dan pertimbangan strategis. Pemilihan desa juga dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan program litkaji BPTP Kalimantan Tengah saat ini dan yang akan datang. Sedangkan 50 petani contoh di kabupaten Kapuas dan 40 petani di Barito Selatan diambil secara acak sederhana.

Pengelompokan rumah tangga tani berdasarkan tingkat pendapatan, yaitu: pendapatan rendah, sedang, dan tinggi, mengacu kepada Adnyana, dkk, (2000). Masing-masing kelompok didefinisikan sebagai berikut:

- (1) Pendapatan rendah : pendapatan $\leq \Pi - 0.50$ sd.
- (2) Pendapatan sedang : $\Pi - 0.50$ sd < pendapatan < $\Pi + 0.50$ sd.
- (3) Pendapatan tinggi : pendapatan $\geq \Pi + 0.50$ sd.

Dimana: Π = rata-rata pendapatan rumah tangga petani contoh, dan

sd = standard deviasi pendapatan rumah tangga petani contoh.

Analisis data dilakukan dengan statistik sederhana, terutama menggunakan nilai rata-rata hitung (mean). Disamping itu, analisis Gini Indeks dilakukan untuk mengevaluasi tingkat ketimpangan penguasaan lahan dan pendapatan rumah tangga petani. Berdasarkan formula yang dikembangkan oleh Szal dan Robinson (1977), maka Gini Indeks dihitung sebagai berikut:

$$G = 1 + 1/n - 2/(n^2 Y_r) [\sum Y_i]$$

Dimana: G = Gini indeks
 n = jumlah rumah tangga contoh
 Y_r = luas lahan rata-rata
 Y_i = luas lahan rumah tangga ke-i.

STRUKTUR PENGUASAAN LAHAN

Pemilikan Lahan

Di lahan pasang surut Basarang, kabupaten Kapuas, luas pemilikan lahan rata-rata 2.19 ha sawah pasang surut dan sekitar 0.26 ha pekarangan. Dari sawah pasang surut seluas 2.19 ha, baru sekitar 0.70 ha yang diusahakan untuk pertanian. Rendahnya pemanfaatan lahan ini sebagian disebabkan oleh keterbatasan tenaga kerja, modal usaha, dan kondisi lahan yang berat akibat rusaknya sistem tata air yang ada. Rusaknya sistem tata air telah menyebabkan genangan air cukup dalam pada musim hujan, dan bahan sulfidik dari pirit terbawa ke atas permukaan lahan tanpa bisa dibuang melalui saluran drainase. Tipologi lahan pasang surut di lokasi contoh adalah sulfat masam potensial (SMP), dengan tipe luapan B dan C (Widjaja-Adhi, 1992 dan 1993). Pada musim kemarau lahan mengalami kekeringan. Dari lahan pekarangan seluas 0.26 ha, sekitar 0.10 ha dimanfaatkan untuk bangunan rumah, halaman, taman, sumur, dsb., dan sisanya (0.16 ha) dimanfaatkan sebagai kebun pekarangan, seperti terlihat pada Tabel 1.

Di lahan kering Dusun Tengah, Barito Selatan, rata-rata pemilikan lahan cukup luas, yaitu sekitar 3.27 ha. Dari luasan tersebut 1.93 ha berupa kebun karet, 0.25 ha pekarangan, dan sekitar 0.21 ha merupakan cekungan lahan yang pada musim hujan bisa digunakan sebagai sawah tadah hujan, dan sisanya tegalan untuk usaha tanaman semusim.

Tabel 1. Luas Lahan Milik dan Garapan Petani Contoh di Kalteng, 2000

Jenis lahan	Agro-ekosistem			
	Lahan Ps.Surut (ha)		Lahan Kering (ha)	
	Milik	Garapan	Milik	Garapan
Sawah Tadah Hujan	-	-	0.210	0.210
Sawah Pasang Surut	2.193	0.698	-	-
Tegalan	-	-	0.875	0.713
Kebun	-	-	1.931	2.206
Pekarangan	0.265	0.161	0.250	0.150
Total	2.458	0.859	3.266	3.069

Dari Tabel 1 terlihat bahwa di lahan kering hampir seluruh lahan yang dimiliki digarap. Sedangkan di lahan pasang surut, hanya sebagian kecil yang digarap, karena berbagai kendala seperti telah disebutkan diatas.

Distribusi Rumah Tangga Berdasarkan Penguasaan Lahan.

Penguasaan aset yang paling signifikan mencerminkan tingkat ekonomi petani adalah luas pemilikan dan penguasaan lahan. Namun di daerah transmigrasi variasi penguasaan lahan tidak begitu besar seperti halnya masyarakat non transmigran. Sebab pada awalnya semua petani mendapat jatah lahan dengan luas yang sama, yaitu rata-rata 2 ha lahan garapan dan 0.25 ha pekarangan per kepala keluarga. Perubahan akan terjadi setelah beberapa tahun, dimana ada petani yang menjual dan membeli tanah, dan ada rumah tangga baru (pecahan KK) yang menyebabkan sebagian petani harus membagi lahannya kepada keluarga yang baru. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak akan membuat ketimpangan pemilikan lahan yang besar, seperti halnya pada masyarakat petani non transmigran.

Seperti terlihat pada Tabel 2, bahwa sebaran rumah tangga tani berdasarkan luas pemilikan lahan cukup baik. Di lahan pasang surut, rumah tangga yang memiliki lahan sempit (< 1 ha), sedang (1-2 ha), dan luas (> 2 ha), berturut-turut sebesar 33 persen, 31 persen dan 26 persen. Hanya 10 persen rumah tangga tidak mempunyai lahan, yaitu keluarga baru yang masih menggarap lahan orang tuanya. Demikian juga petani yang mempunyai lahan kurang dari 2 ha, sebagian besar adalah keluarga pecahan yang mendapat bagian lahan dari orang tuanya, serta petani yang telah memberi sebagian lahannya kepada anaknya yang telah menikah.

Sebaliknya, di lahan kering sebagian besar (82%) rumah tangga petani memiliki lahan lebih besar dari 2 ha. Hal ini disebabkan bahwa petani contoh di kabupaten Barito Selatan adalah peserta PIR karet yang sejak awal telah mendapat jatah lahan seluas 3 ha. Lahan tersebut terdiri dari: kebun karet seluas 2 ha, lahan usaha untuk tanaman pangan 0,75 ha, dan pekarangan 0,25

ha. Petani contoh yang tidak mempunyai lahan hanya satu orang, yaitu transmigran spontan yang datang untuk berburuh menyadap karet. Sebanyak 6 petani contoh (15%) memiliki lahan kurang dari 2 ha, yaitu petani yang sudah membagi sebagian lahannya dan petani yang mendapat sebagian lahan dari orang tuanya, seperti halnya di lahan pasang surut (Tabel 2).

Tabel 2. Distribusi Petani Contoh Berdasarkan Luas Penguasaan Lahan di Kalteng, 2000.

Skala Pemilikan	Agro-ekosistem			
	Lahan Ps.Surut (ha)		Lahan Kering (ha)	
	N	%	N	%
Tidak punya (0 ha)	5	10,20	1	2,50
Sempit (< 1 ha)	16	32,65	3	7,50
Sedang (1-2 ha)	15	30,61	3	7,50
Luas (> 2 ha)	13	26,53	33	82,50
Total	49	100	40	100
Gini indeks pemilikan		0,42		0,28
Gini indeks penggarapan		0,49		0,27

Gini Indeks Penguasaan Lahan

Tingkat ketimpangan penguasaan lahan dapat diukur dari suatu parameter yang biasa disebut gini indeks. Jika penguasaa lahan menyebar rata secara sempurna, maka angka gini indeks akan mendekati nol. Jika indeks gini mendekati satu, maka sebaran penguasaan lahan sangat timpang. Artinya, sebagian besar lahan yang ada dikuasai oleh beberapa orang tertentu (tuan tanah). Dalam penelitian ini penguasaan lahan dibagi menjadi pemilikan lahan dan lahan garapan.

Sampai saat ini belum ada standar baku yang dijadikan pedoman umum secara luas tentang kriteria ketimpangan dengan menggunakan gini indeks. Sumaryanto, dkk. (1997), menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh Oshima (1976), yaitu: (i) jika gini indeks ($G < 0.4$), maka ketimpangan termasuk katagori rendah; (ii) jika ($0.4 \leq G \leq 0.5$), maka ketimpangan tergolong sedang; dan (iii) jika ($G > 0.5$), maka ketimpangan sudah tergolong tinggi.

Dari hasil analisis diperoleh bahwa gini indeks pemilikan lahan dan penggarapan lahan di daerah pasang surut berturut-turut sebesar 0,42 dan 0,49, seperti disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan kriteria Oshima, maka tingkat ketimpangan

dalam pemilikan dan penggarapan lahan di daerah pasang surut tergolong sedang. Dari hasil analisis juga didapat bahwa secara relatif ketimpangan dalam pemilikan lahan lebih kecil dari penggarapan. Hal ini diduga disebabkan oleh kemampuan petani menggarap lahan lebih beragam dari pada pemilikan. Karena di daerah transmigrasi setiap orang mendapat jatah lahan yang sama, meskipun kemudian terdapat perubahan akibat adanya keluarga baru. Sebaliknya, kemampuan mengolah lahan akan sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja dan modal masing-masing petani.

Di lahan kering, gini indeks untuk pemilikan dan penggarapan lahan berturut-turut sebesar 0,28 dan 0,27. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan, baik dalam pemilikan maupun penggarapan lahan, di daerah ini tergolong rendah. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa sekitar 82 persen petani contoh memiliki dan mengolah lahan lebih dari 2 ha. Hal ini merupakan kondisi yang wajar, karena petani contoh adalah peserta PIR karet yang mendapat kredit kebun karet yang sama, yaitu 2 ha, dan tegalan 0,75 ha. Meskipun telah terjadi jual beli kebun dan tegalan, namun hal itu tidak menyebabkan ketimpangan dalam penguasaan lahan.

STRUKTUR PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

Struktur Pendapatan Rumah Tangga

Sebagian besar pendapatan rumah tangga petani berasal dari bidang pertanian. Seperti terlihat pada Tabel 3, bahwa 63 persen pendapatan rumah tangga petani di lahan pasang surut berasal dari sektor pertanian. Sekitar 49 persen diantaranya berasal dari usahatani sendiri (on-farm), dan hampir 15 persen dari berburuh tani (off-farm). Sementara itu, pendapatan yang berasal dari luar pertanian (non-farm) sekitar 37 persen. Sumber pendapatan dari luar sektor pertanian yang paling besar kontribusinya adalah berburuh (buruh angkut kayu, buruh bangunan, dsb.). Penyumbang pendapatan kedua adalah dari perdagangan (tengkulak, warung, pedagang keliling, dsb.). Sumber pendapatan lainnya adalah dari sektor industri (buruh pabrik), jasa angkutan (ojek), dan jasa lainnya.

Di lahan kering, sebesar 90 persen pendapatan rumah tangga berasal dari sektor pertanian, yaitu sekitar 81 persen dari usahatani sendiri dan 9 persen dari berburuh tani. Sumber pendapatan utama dari sektor pertanian di lokasi penelitian adalah sub sektor perkebunan (karet). Semua petani contoh di lokasi ini adalah peserta PIR karet. Kontribusi pendapatan dari non pertanian adalah sekitar 10 persen. Sumber pendapatan yang paling besar kontribusinya di luar sektor pertanian adalah buruh harian (6%), yaitu berburuh menambang batu untuk bahan bangunan.

Tabel 3. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani Contoh di Kalteng, 2000.

Sumber Pendapatan	Agro-ekosistem				Agregat	
	Lahan Ps.Surut		Lahan Kering		Rataan (Rp)	(%)
	Rataan (Rp)	(%)	Rataan (Rp)	(%)		
I. Pertanian	4.120.110	63,46	6.188.069	90,03	5.049.530	75,78
a. Usahatani	3.165.314	48,76	5.590.599	81,33	4.255.330	63,86
b. Buruh tani	954.796	14,71	597.470	8,69	794.200	11,92
II. Non-Pertanian	2.371.837	36,54	685.500	9,97	1.613.933	24,22
a. Perdagangan	712.653	10,98	97.500	1,42	436.180	6,55
b. Transportasi	210.204	3,24	0	0,00	115.730	1,74
c. Jasa	50.000	0,77	0	0,00	27.528	0,41
d. Industri	489.796	7,54	45.000	0,65	289.888	4,35
e. Berburuh	889.286	13,70	386.000	5,62	663.090	9,95
f. Lain-lain	19.898	0,31	157.000	2,28	81.517	1,22
Total	6.491.947	100,00	6.873.569	100,00	6.663.463	100,00

Secara nominal, pendapatan rumah tangga dari sektor pertanian di lahan kering (Rp 6,2 juta/th) ternyata lebih tinggi dari pada di lahan pasang surut (4,1 juta/th). Hal ini disebabkan oleh luasnya lahan usaha dalam bentuk kebun karet di lahan kering (>2 ha), sedangkan di lahan pasang surut petani hanya mampu mengusahakan tanaman pangan dalam luasan yang relatif kecil (< 1 ha). Ini juga berarti bahwa petani di daerah transmigrasi tidak bisa mengharapkan pendapatan yang lebih tinggi jika hanya menggantungkan diri pada usahatani komoditas tanaman pangan. Tanaman perkebunan, jika dikelola dengan baik akan lebih menjanjikan dalam memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Tanaman pangan hanya sebagai tanaman penjamin keamanan pangan.

Sebaliknya, petani di lahan pasang surut berusaha memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di luar sektor pertanian (Rp 2,37 juta/th), dibandingkan dengan di lahan kering (Rp 0,69 juta/th). Hal ini memungkinkan, karena lokasi penelitian ini dekat dengan kota Kuala Kapuas dimana terdapat banyak kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Bagi daerah yang kurang akses, perlu diupayakan usahatani tanaman perkebunan yang dalam jangka panjang dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Dengan jumlah anggota rumah tangga rata-rata 4,96 orang/KK di lahan pasang surut dan 3,32 orang/KK di lahan kering, maka besarnya pendapatan per kapita per tahun adalah Rp 1,3 juta dan Rp 2,1 juta berturut-turut di lahan pasang surut dan lahan kering, seperti disajikan pada Tabel 4. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa besarnya pendapatan di lahan kering sebagian disebabkan tingginya pendapatan dari sub sektor perkebunan, yaitu karet. Tingginya pendapatan perkapita juga disebabkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per kepala keluarga relatif lebih kecil dibandingkan dengan di lahan pasang surut.

Tabel 4. Struktur Pendapatan Perkapita Rrumah Tangga Petani Contoh di Kalteng, 2000.

Sumber Pendapatan	Agro-ekosistem				Agregat	
	Lahan Ps.Surut		Lahan Kering		Rataan (Rp)	(%)
	Rataan (Rp)	(%)	Rataan (Rp)	(%)		
I. Pertanian	824.022	63,46	1.875.172	90,03	1.202.269	75,78
a. Usahatani	633.063	48,76	1.694.121	81,33	1.013.174	63,86
b. Buruh tani	190.959	14,71	181.052	8,69	189.095	11,92
II. Non-Pertanian	474.367	36,54	207.727	9,97	384.270	24,22
a. Perdagangan	142.531	10,98	29.545	1,42	103.852	6,55
b. Transportasi	42.041	3,24	0	0,00	27.555	1,74
c. Jasa	10.000	0,77	0	0,00	6.554	0,41
d. Industri	97.959	7,54	13.636	0,65	69.021	4,35
e. Berburuh	177.857	13,70	116.970	5,62	157.879	9,95
f. Lain-lain	3.980	0,31	47.576	2,28	19.409	1,22
Total	1.298.389	100,00	2.082.900	100,00	1.586.539	100,00
Gini indeks		0,44		0,36		

Gini Indeks Pendapatan Rumah Tangga

Distribusi pendapatan di lahan pasang surut ternyata lebih timpang dibandingkan dengan di lahan kering, dimana ketimpangan di lahan pasang surut tergolong sedang, sedangkan di lahan kering tergolong rendah. Ketimpangan tersebut ditunjukkan oleh gini indeks di kedua daerah tersebut yang masing-masing 0,44 dan 0,36. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh beragamnya lapangan kerja non-pertanian di kabupaten Kapuas dibandingkan dengan kabupaten Barito Selatan. Hal ini terlihat dari besarnya pendapatan yang diperoleh dari luar sektor pertanian, yaitu sekitar Rp 2,4 juta/KK/tahun di Kapuas dan sekitar Rp 0,69 juta/KK/tahun di Barito Selatan. Beragamnya lapangan kerja dengan sendirinya mengakibatkan keragaman pendapatan yang sangat ditentukan oleh bidang keahlian dan kesempatan tiap tenaga kerja. Tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan kesempatan kerja di sektor pertambangan atau kehutanan, cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tetap bertani tanaman pangan di lahan pasang surut.

Struktur Pengeluaran Rumah Tangga

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci dalam hal struktur pengeluaran rumah tangga petani di Kalimantan Tengah, pengeluaran rumah tangga dibagi atas tiga kelompok pendapatan rumah tangga, yakni rendah, sedang dan tinggi. Kelompok rumah tangga berpendapatan rendah adalah dengan pendapatan di bawah Rp 3.446.237 per tahun, kelompok berpendapatan sedang adalah antara Rp 3.446.237 – Rp 9.880.686 per tahun, sedangkan kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi adalah di atas Rp 9.880.686 per tahun. Pengelompokan ini berdasarkan formula yang dikemukakan dalam metodologi.

Struktur pengeluaran rumah tangga berdasarkan atas tiga kelompok pendapatan tersebut secara nominal disajikan pada Tabel 5 dan persentasenya pada Tabel 6. Secara garis besar pengeluaran rumah tangga terbagi dua, yaitu pengeluaran untuk pangan dan non pangan. Kedua pengeluaran ini dapat dirinci lagi menjadi beberapa variabel berdasarkan kebutuhan manusia. Di wilayah agroekosistem lahan pasang surut, pengeluaran untuk pangan berkisar Rp 1.996.00 – Rp 6.305.000 atau rata-rata Rp 3.072.000 per tahun untuk setiap rumah tangga. Pangsa pengeluaran untuk pangan ini berkisar 65,17 – 73,68 persen atau rata-rata 69,18 persen dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain pengeluaran untuk non pangan hanya mencapai 30,82 persen dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa petani di wilayah pasang surut ini relatif belum mampu meningkatkan kualitas hidup dalam hal sandang (pakaian), papan (rumah), pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sekunder lainnya, karena pangsa pengeluaran untuk pangan masih jauh lebih besar dari 50 persen.

Dalam pengeluaran untuk pangan, pengeluaran untuk beras menempati urutan teratas yakni 19,41 – 29,05 persen atau rata-rata 23,41 persen dari seluruh pengeluaran. Berdasarkan data tahun 1998, konsumsi beras di Kalimantan Tengah adalah 143 kg/kapita. Adanya pangan lain sebagai sumber karbohidrat seperti mie, ubikayu dan jagung yang sering dikonsumsi hanyalah sebagai makanan selingan diantara makanan pokok beras.

Tabel 5. Struktur Pengeluaran Rumah Ttangga Petani Contoh Per Tahun Berdasarkan Kelompok Pendapatan di Kalimantan Tengah, 2000 (dalam Rp. 000)

Jenis Pengeluaran	Agroekosistem							
	Pasang Surut				Lahan Kering			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rata2	Rendah	Sedang	Tinggi	Rata2
I. PANGAN	1.966	2.913	6.306	3.072	2.382	2.936	2.651	2.761
a. Beras	775	1.047	1.655	1.039	853	1.010	993	971
b. Mie	65	145	565	178	115	104	219	127
c. Daging	38	59	329	91	32	79	224	94
d. Telur	71	120	424	147	96	153	117	134
e. Ikan	343	465	821	473	294	347	286	324
f. Sayur & Buah	93	136	431	164	91	199	218	178
g. Rokok	218	354	1.083	412	402	439	257	399
h. Gula,kopi/the	249	412	592	381	377	361	320	357
i. Lain-lain	113	173	403	186	122	245	17	177
II.NON PANGAN	702	1.557	2.340	1.368	856	1.496	1.627	1.375
a. Pakaian	228	427	786	409	320	468	399	422
b. Pendidikan	55	248	880	272	78	378	456	324
c. Kesehatan	43	123	237	111	85	125	113	114
d. Listrik & air	91	189	162	150	105	95	158	108
e. Keg. Social	141	256	118	195	154	239	243	221
f. Bantu kelg.	41	38	29	37	27	80	236	95
g. Lain-lain	104	276	129	194	89	110	24	90
T O T A L	2.668	4.470	8.646	4.440	3.238	4.432	4.278	4.136

Bila dilihat dari kelompok pendapatan rumah tangga, tampak bahwa semakin tinggi pendapatan maka persentase pengeluaran untuk beras semakin mengecil. Kelompok pangan sumber protein hewani di wilayah pasang surut yang cukup banyak dikonsumsi adalah ikan, baik dalam bentuk ikan segar atau ikan kering. Sebab di daerah ini ikan relatif murah dan mudah diperoleh. Pangsa pengeluaran untuk ikan rata-rata 10,66 persen, sementara itu untuk telur hanya 3,31 persen, dan daging lebih rendah lagi yakni 2,05 persen. Pengeluaran untuk gula, teh/kopi hampir sama dengan pengeluaran untuk rokok yakni 8,57 persen dan 9,28 persen, merupakan pengeluaran terbesar sesudah beras. Sedangkan untuk sayuran dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral pangsa pengeluarannya hanya mencapai 3,69 persen.

Table 6. Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Petani Contoh Per Tahun Berdasarkan Kelompok Pendapatan di Kalimantan Tengah, 2000 (dalam %).

Jenis Pengeluaran	Agroekosistem							
	Pasang Surut				Lahan Kering			
	Rendah	Sedang	Tinggi	Rata2	Rendah	Sedang	Tinggi	Rata2
PANGAN	73.68	65.17	72.93	69.18	73.55	66.25	61.97	66.76
a. Beras	29.06	23.43	19.14	23.41	26.34	22.78	23.22	23.48
b. Mie	2.45	3.25	6.54	4.02	3.55	2.34	5.12	3.06
c. Daging	1.42	1.32	3.80	2.05	0.98	1.78	5.24	2.27
d. Telur	2.65	2.69	4.90	3.31	2.97	3.46	2.74	3.24
e. Ikan	12.84	10.40	9.49	10.66	9.09	7.82	6.69	7.84
f. Sayur & Buah	3.48	3.05	4.99	3.69	2.81	4.48	5.09	4.30
g. Rokok	8.17	7.92	12.53	9.28	12.41	9.91	6.00	9.64
h. Gula,kopi/teh	9.34	9.22	6.85	8.57	11.63	8.14	7.48	8.64
i. Lain-lain	4.25	3.88	4.66	4.18	3.77	5.53	0.40	4.29
NON PANGAN	26.32	34.83	27.07	30.82	26.45	33.75	38.03	33.24
a. Pakaian	8.54	9.56	9.09	9.21	9.87	10.56	9.32	10.21
b. Pendidikan	2.05	5.55	10.18	6.12	2.41	8.52	10.65	7.83
c. Kesehatan	1.62	2.75	2.74	2.51	2.63	2.82	2.63	2.75
d. Listrik & air	3.41	4.22	1.87	3.38	3.23	2.15	3.69	2.62
e. Keg. sosial	5.27	5.73	1.37	4.39	4.75	5.40	5.68	5.34
f. Bantu kelg.	1.54	0.84	0.33	0.84	0.82	1.81	5.51	2.30
g. Lain-lain	3.88	6.18	1.49	4.36	2.75	2.49	0.56	2.18
T O T A L	100	100	100	100	100	100	100	100
Gini indeks				0.22				0.25

Kelompok pengeluaran non pangan yang terbesar adalah untuk pakaian dan pendidikan masing-masing 9,21 persen dan 6,12 persen dari rata-rata pangsa pengeluaran rumah tangga. Sedangkan pengeluaran non pangan lainnya berkisar 0,84 – 4,39 persen. Terbatasnya jumlah pendapatan rumah tangga yang diperburuk oleh krisis ekonomi yang terjadi, mengakibatkan rumah tangga mengganti jenis barang yang dikonsumsi terutama untuk non pangan dengan kualitas yang lebih rendah yang masih terjangkau oleh pendapatan yang dimiliki.

Pada agro-ekosistem lahan kering, struktur pengeluaran rumah tangga tidak banyak berbeda dibandingkan keadaan agroekosistem lahan pasang surut (Tabel 17 dan Tabel 18). Pengeluaran rumah tangga petani di lahan kering untuk pangan berkisar Rp 2.381.000 – Rp 2.936.000 atau rata-rata Rp 2.761.000 setahun. Sedangkan untuk non pangan antara Rp 867.000 dan Rp 1.627.000 atau rata-rata Rp 1.375.000 setahun. Tanpa membedakan kelompok pendapatan, pangsa pengeluaran untuk pangan rata-rata 66,76 persen dan untuk non pangan 33,24 persen. Artinya pangsa pengeluaran rumah tangga sebagian besar masih dialokasikan untuk pangan, sehingga upaya meningkatkan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan sekunder masih sangat terbatas.

Pada kelompok pangan, pengeluaran untuk beras mencapai 23,48 persen dari seluruh pengeluaran rumah tangga yang merupakan pangsa terbesar. Kemudian diikuti oleh pengeluaran untuk rokok (9,64 persen), gula dan teh (8,64 persen). Diantara sumber protein hewani, pangsa pengeluaran untuk ikan masih paling besar dibanding telur dan daging yakni berturut-turut 7,84 persen, 3,24 persen dan 2,27 persen. Sayuran dan buah-buahan yang harganya cukup murah di daerah ini, pangsa pengeluarannya hanya 4,30 persen. Pengeluaran untuk mie sebagai makanan selingan untuk sumber karbohidrat dan protein nabati hampir sama dengan di wilayah pasang surut yakni 3,06 persen.

Lebih jauh dari Tabel 5 dan Tabel 6 tanpa membedakan agroekosistem, tampak bahwa pengeluaran rumah tangga petani di Kalimantan Tengah sebagian besar masih untuk kebutuhan pangan. Semakin rendah pendapatan, pangsa pengeluaran untuk pangan semakin besar terutama beras, sedangkan untuk pengeluaran non pangan, pangsa terbesar adalah untuk pakaian dan biaya pendidikan.

Gini Indeks Pengeluaran Rumah Tangga

Struktur pengeluaran rumah tangga antar petani di wilayah lahan pasang surut dan antar petani di wilayah lahan kering relatif merata. Hal ini ditandai oleh gini indeks masing-masing 0,22 dan 0,25. Artinya, sebaran struktur pengeluaran rumah tangga petani di kedua wilayah ini, baik nominal maupun pangasanya relatif merata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Di lahan pasang surut Basarang, kabupaten Kapuas, luas pemilikan lahan rata-rata 2.19 ha sawah pasang surut dan sekitar 0.26 ha pekarangan. Dari sawah pasang surut seluas 2.19 ha, baru sekitar 0.70 ha diusahakan untuk pertanian. Rendahnya pemanfaatan lahan ini sebagian disebabkan oleh keterbatasan tenaga kerja, modal usaha, dan kondisi lahan yang berat akibat rusaknya sistem tata air yang ada.

2. Ketimpangan pemilikan dan penggarapan lahan di daerah pasang surut tergolong sedang. Hal ini ditunjukkan oleh gini indeks masing-masing di daerah tersebut sebesar 0.42 dan 0.49. Ketimpangan dalam pemilikan lahan lebih kecil dari penggarapan. Hal ini disebabkan karena kemampuan petani menggarap lahan lebih beragam dari pada pemilikan.
3. Di lahan kering Dusun Tengah, Barito Selatan, rata-rata pemilikan lahan cukup luas, yaitu sekitar 1.93 ha lahan kabun untuk karet, dan 1.33 ha lahan kosong untuk pekarangan dan tanaman semusim. Ketimpangan pemilikan dan penggarapan lahan sangat rendah, yang ditunjukkan oleh gini indeks berturut-turut sebesar 0.28 dan 0.27.
4. Sektor pertanian masih merupakan sumber pendapatan utama, yaitu masing-masing 63 persen dari total pendapatan rumah tangga di lahan pasang surut dan 90 persen dari total pendapatan rumah tangga di lahan kering. Perbedaan kontribusi sektor pertanian terhadap total pendapatan rumah tangga di kedua kabupaten lokasi penelitian terutama disebabkan oleh perbedaan keragaman lapangan kerja di luar sektor pertanian.
5. Pengeluaran rumah tangga petani baik yang berpendapatan rendah, sedang, maupun tinggi sebagian besar di alokasikan untuk kebutuhan pangan. Pangsa pengeluaran untuk pangan ini berkisar 65-74 persen di lahan pasang surut dan 62-67 persen di lahan kering. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga petani baik di lahan pasang surut maupun di lahan kering relatif belum mampu meningkatkan kualitas hidup dalam hal sandang (pakaian), papan (rumah), pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sekunder lainnya. Hal ini juga menandakan bahwa kemampuan petani dalam pemupukan modal bagi peningkatan mutu usahatani masih rendah.

Saran

1. Sebagian besar petani menghadapi keterbatasan modal kerja. Oleh karena itu, aksesibilitas petani terhadap sumber modal perlu ditingkatkan. Salah satu langkah untuk itu adalah perbaikan sistem perkreditan. Petani memerlukan kehadiran Bank Unit Desa atau Bank Pertanian di pedesaan, agar mereka bisa akses langsung dengan sumber modal. Prosedur yang ada saat ini perlu disederhanakan dengan meminimumkan institusi yang terlibat, sehingga proses realisasi kredit bisa lebih cepat, dan petani tidak perlu menanggung beban fee yang besar untuk berbagai lembaga yang terlibat.
2. Pada lahan pasang surut, perlu dilakukan rehabilitasi jaringan tata air, agar lahan pasang surut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani sebagai sumber daya yang produktif. Pembangunan jaringan tata air maupun rehabilitasi dan penataan kembali jaringan tata air yang sudah ada, harus disesuaikan dengan tipologi lahan, tipe luapan air dan kebutuhan untuk pertanian. Badan Litbang Pertanian sudah sejak lama merekomendasikan jaringan tata air satu arah. Disamping itu, perlu dilakukan upaya pemberdayaan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pengelola Air) untuk bekerja sama dalam pemeliharaan jaringan tata air. Karena kalau dilakukan sendiri-sendiri tidak akan efektif.
3. Pada lahan kering pola usahatani yang disarankan adalah usahatani terpadu antara tanaman pangan, ternak dan tanaman perkebunan. Ketiga komoditas ini akan saling menunjang, baik untuk menghasilkan pangan bagi rumah tangga, maupun sebagai tulang punggung ekonomi dari hasil ternak dan tanaman perkebunan. Usahatani terpadu ini diharapkan juga sekaligus sebagai usaha konservasi tanah dan air.
4. Alternatif teknologi, baik teknologi baru maupun teknologi yang diperbaiki yang ditawarkan kepada petani, sebaiknya berupa teknologi dengan masukan sedang sampai rendah. Apabila pendapatan petani sudah meningkat barulah dapat diintroduksi teknologi dengan masukan tinggi (padat modal) yang juga mampu memberikan produksi dan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani.

5. Dalam upaya mempercepat proses alih teknologi melalui pendekatan partisipatif, maka disarankan agar frekuensi dan sebaran lokasi “gelar teknologi” oleh BPTP Kalimantan Tengah lebih diperbanyak. Dalam pelaksanaannya, agar BPTP mengikutsertakan lebih banyak petani/kelompok tani, sejak mulai perencanaan sampai pelaksanaannya, supaya para petani dapat melihat dan mengevaluasi langsung pelaksanaan dan keragaan teknologi yang digelar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M.O., dkk. 2000. Assessing Rural Development Impact of The Crisis in Indonesia. Center for Agro Socioeconomic Research, Bogor Indonesia and The World Bank. Washington DC. USA.
- BPS-Kalteng, 1999. Kalimantan Tengah Dalam Angka. Palangkaraya.
- Pasandaran, E. dan M.O. Adnyana, 1995. Tugas dan Fungsi BPTP/LPTP dan Kaitannya dengan Penyediaan Teknologi Bagi Petani-Nelayan Kecil. Makalah disajikan pada Pertemuan Konsultasi Pimbagpro P4K. Ciawi, 27-30 Maret 1995.
- Sumaryanto dan S. Pasaribu, 1997. Struktur Penguasaan Tanah di Pedesaan Lampung. Studi Kasus di Enam Desa. Prosiding Agribisnis : Dinamika Sumberdaya dan Pengembangan Sistem Usaha Pertanian. Buku II. PSE. Bogor.
- Suryana, A. 1996. Peranan dan Fungsi BPTP/LPTP dalam Pembangunan Pertanian Daerah Menuju Era Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas. Makalah disajikan pada Lokakarya BPTP/LPTP se Indonesia di Mataram, 14-17 Juli 1996.
- Szal, R. and R. Robinson, 1977. Measuring Income Inequality, dalam Frank and Webb: Income Distribution and Growth in Less Developed Countries. The Brooking Institute. Pp. 491-533.
- Widjaja-Adhi, IPG. 1992. Tipologi, Pemanfaatan dan Pengembangan Lahan Pasang Surut. Makalah disajikan dalam Forum Komunikasi Ilmiah Penelitian Pengembangan Kelapa Pasang Surut di Bogor, 28-29 Agustus 1992.
- _____. 1993. Potensi Lahan Rawa di Kalimantan. Pengelolaan dan Teknologi Pengembangannya. Makalah disajikan dalam Temu Konsultasi Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Wilayah Kalimantan. Palangka-aya, 5-6 Agustus 1993.